

**PENGARUH PAJAK INDUSTRI PARIWISATA DAN RETRIBUSI OBYEK  
WISATA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI 12  
KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI RIAU TAHUN 2009–2013**

**Oleh :**

**Mahasiswa : Robi Cahyadi**

**Pembimbing : Dr. H. M. Rasuli, SE, M.Si.,Ak.,CA  
Lila Anggraini, SE, M.Si.,Ak.,CA**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

***Abstract***

*One of indicators used to determine the effect of tourism on local revenue is through the development of tourism revenue received by the tax tourism industry and tourism levy. Where this would describe the situation every tourism trip would be beneficial to the economy of a region that is in visited and impacted to the revenue which would increase also. This study aims to determine the tax effects of the tourism industry and tourism levy on revenue (PAD) in 12 districts / cities of Riau Province in 2009-2013.*

*In this research used period (time series) data and latitude series data (cross section) while the source data using secondary data, then analyzed by the method of multiple linear regression (with SPSS version 16.0).*

*The results of tests showed that the tax variable tourism industry and tourism levy variables have a significant effect on the variable revenue. T-test showed that the tourism industry tax variables have the most significant effect on the regional income variable  $t$  of 1.801 and significance probability of  $0.005 < 0.05$ . The magnitude of the effect that ( $R^2$ ) by these two variables together against the dependent variable that is equal to 24.7% while the remaining 75.3% is influenced by other variables not examined in this study.*

*Keywords: tax tourism industry, tourism levy, local revenue*

## **1 Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah,

dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut UU No. 28

Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam hubungannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan di daerah, salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Penerimaan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penunjang pendapatan asli daerah, melalui penerimaan pos-pos kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berimbas pada penerimaan yang diterima oleh daerah di sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata bersumber dari pajak dan retribusi yakni pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi obyek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata. Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu penambah pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara

berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakkan pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi wisatawan. Menurut Wahab (2006) dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata.

Dalam hal ini, Provinsi Riau dengan anugerah kekayaan alamnya beserta beberapa obyek wisata dan budaya ataupun fasilitas rekreasi yang telah dimiliki, akan mempunyai prospek yang cerah untuk dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Keadaan tersebut akan terwujud apabila perencanaan dilaksanakan dengan baik dan matang yang dilaksanakan di jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Provinsi Riau, sehingga diharapkan apabila hal tersebut dapat terus dijalankan dan ditingkatkan akan semakin memperbesar kemungkinan

meningkatnya PAD yang diperoleh dari sektor pariwisata tersebut, yang pada akhirnya PAD yang diperoleh dari sektor ini dari tahun ke tahun diharapkan akan terus meningkat.

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas Negara (devisa) pada umumnya dan kas daerah (PAD) pada khususnya, untuk itu perlu adanya pengembangan industri pariwisata baik itu objek wisata atau fasilitas pendukung lainnya dengan bermuara pada peningkatan pendapatan. Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten / Kota Provinsi Riau telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan, hiburan, perdagangan dan juga sektor hotel dan restoran. Besarnya kontribusi sektor hotel dan restoran hingga sektor hiburan dalam penerimaan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat pada sektor ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul: “Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di 12

kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2009-2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2009-2013.

## **2 Telaah Pustaka**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isdijoso, 2008). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Isdijoso (2008) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang ada pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil

retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 2.2 Pajak Industri Pariwisata

Pajak industri pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota di mana berasal dari pajak hotel (termasuk wisma pariwisata, losmen, motel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10), pajak restoran (rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering), dan pajak hiburan (tontonan film, pagelaran seni, musik, tari, pagelaran busana, pameran, diskotek, karaoke, klub malam, sirkus, permainan bilyard, panti pijat, refleksi, mandi uap, pertandingan olahraga).

Menurut sejarahnya, pajak pariwisata hanya dikenakan secara musiman saja, di kabupaten/kota di mana pariwisata merupakan sumber penghasilan penting, tapi tidak diberlakukan sepanjang tahun. Besaran pajak ditentukan oleh variabel tetap berdasarkan kelas (bintang) hotel, jumlah yang dikenakan per hari dan per orang.

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata dan souvenir), berbagai macam hiburan dan usaha perjalanan wisata (*travel agent* atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang berupa pajak

daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak (Wahab, 2006).

## 2.3 Retribusi Obyek Wisata

Retribusi obyek wisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut.

Kontribusi sektor usaha perhotelan dan restoran merupakan sarana pendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata diharapkan akan mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran. Baiknya tingkat pelayanan dan kepuasan wisatawan akan memberikan kesan yang menyenangkan terhadap pariwisatanya, sehingga memungkinkan kembalinya para wisatawan untuk berkunjung (Suwanto, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Roerkaerts dan Savat (Pleangra, 2012) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah: (a)menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, (b)membuka

kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, (c)menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh, (d)merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Acep Sani Saepurahman (2012) yang meneliti pengaruh pajak industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa pajak industri pariwisata (pajak hotel dan restoran) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Gunastri (2013) menyatakan bahwa pajak industri pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klungkung.

Rahma & Handayani (2013) yang meneliti mengenai pengaruh retribusi obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Kudus menyatakan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rantetadung (2012) menyatakan variabel retribusi obyek

wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Nabire.

Selanjutnya Akbar (2011) yang meneliti jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan tahun 1991-2010 menyatakan variabel retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan anggaran pembangunan daerah.

## **2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **2.5.1 Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pajak daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak industri pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota di mana berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Penelitian yang dilakukan oleh Tirtawati dengan judul Pengaruh pajak hotel dan restoran (PHR), Pajak hiburan dan Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prospek kontribusi (PAD) terhadap APBD Kabupaten Badung menyatakan bahwa secara serempak PHR, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap

PAD memiliki pengaruh yang nyata, dan secara parsial hanya PHR yang berpengaruh nyata.

H1 : Pajak Industri Pariwisata memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.5.2 Pengaruh Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

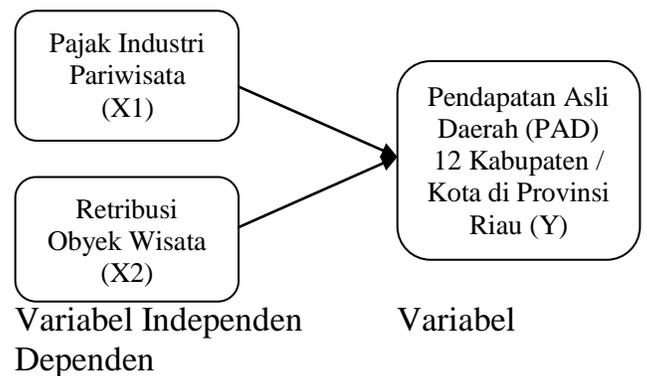
Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan obyek pariwisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Dan nantinya akan memberikan sumbangan/pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah itu sendiri. Gunastri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan yang bersumber dari retribusi obyek wisata, kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat berupa penginapan/hotel, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga dapat dikatakan bahwa

sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang dianggap cukup prospektif untuk mengangkat pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma & Handayani (2013) menyatakan bahwa retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

H2 : Retribusi Obyek Wisata memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.5.3 Model Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan model penelitian pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 : Model Penelitian

## 3 Metode Penelitian

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang sudah cukup dikenal dengan potensi pariwisatanya baik di nusantara

maupun mancanegara, dengan waktu penelitian pada Juli 2014 s/d selesai.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah (PAD), data retribusi obyek wisata, data pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Riau dan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Provinsi Riau.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2009-2013 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 12 kabupaten / kota di Provinsi Riau yang menghasilkan 59 observasi. Meliputi data: Pajak Daerah (pajak hotel, restoran dan hiburan), Retribusi Daerah (karcis masuk kunjungan ke obyek wisata), dan Pendapatan Asli Daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengkajian informasi dari terbitan berkala, buku, literatur, dokumen, foto-foto, surat kabar dll.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel terikat adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi indikator adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan yang berfungsi sebagai variabel bebas yaitu: (1) Pajak industri pariwisata, dengan indikator adalah jumlah penerimaan pajak hotel, restoran dan pajak hiburan; (2) Retribusi obyek wisata, dengan indikatornya adalah jumlah penerimaan retribusi karcis masuk dan karcis parkir obyek wisata.

### **3.6 Metode Analisis**

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Industri Pariwisata, dan Retribusi Obyek Wisata.

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi

kumulatif dari distribusi normal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (Gujarati, 2009). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

### 3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini akan menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi.

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka

diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

## 3.7 Model Regresi

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Gujarati, 2009). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 16.00.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2009). Ada satu persamaan regresi, persamaan regresi tersebut yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$$

Dimana :

Y = pendapatan asli daerah (PAD)  
X<sub>1</sub> = Pajak Industri Pariwisata (PIP)  
X<sub>2</sub> = Retribusi Obyek Wisata (ROW)  
 $\alpha$  = bilangan konstanta  
 $\beta_1 \beta_2$  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

## 3.8 Uji Statistik

### 3.8.1 Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (Ghozali, 2006).

### 3.8.2 Uji F

Dalam Gujarati (2009), uji Fisher (uji F) merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel.

### 3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Digunakan untuk melihat seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi/ perubahan variabel independen. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*).

## 4 Hasil Penelitian

### 4.1 Statistik Deskriptif

#### 4.1.1 Pajak Industri Pariwisata

Nilai minimum pajak industri pariwisata atau yang terendah di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 sebesar Rp 351.000.000,00. Selanjutnya untuk nilai maksimum pajak industri pariwisata atau yang tertinggi di Provinsi Riau diperoleh

Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar Rp 17.221.000.000,00. Nilai rata-rata (mean) pajak industri pariwisata selama lima tahun sebesar Rp 5.440.423.700,00 sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar Rp 3.428.972.140,00 lebih kecil dari nilai mean yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### 4.1.2 Retribusi Obyek Wisata

Nilai minimum retribusi obyek wisata atau yang terendah di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 sebesar Rp 20.000.000,00. Selanjutnya untuk nilai maksimum retribusi obyek wisata atau yang tertinggi di Provinsi Riau diperoleh Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar Rp 1.844.000.000,00. Nilai rata-rata (mean) retribusi obyek wisata selama lima tahun sebesar Rp 399.915.300,00 sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar Rp 347.873.260,00 lebih kecil dari nilai mean yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### 4.1.3 Pendapatan Asli Daerah

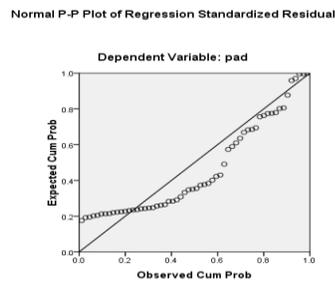
Nilai minimum pendapatan asli daerah atau yang terendah di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 sebesar Rp 6.149.000.000,00. Selanjutnya untuk nilai maksimum pendapatan asli daerah atau yang tertinggi di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Siak pada tahun 2009 sebesar Rp 413.795.000.000,00. Nilai rata-rata (mean) pendapatan asli daerah selama lima tahun sebesar Rp 111.114.915.300,00 sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar

Rp 102.005.496.200,00 lebih kecil dari nilai mean yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

## 4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

### 4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Grafik *normal probability plot* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Normal Probability Plot

Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tes Kolmogorov-Smirnov*. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai K-S untuk variabel pajak industri pariwisata 1,123 dengan probabilitas signifikansi 0,160 dengan nilai lebih besar  $\alpha=0,05$  hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data

terdistribusi normal. Nilai K-S variabel retribusi obyek wisata 3,064 dengan probabilitas signifikansi 0,061 yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

### 4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

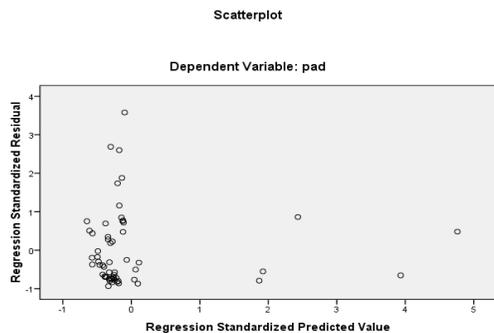
Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, diperoleh angka *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk setiap variabel independen (pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10 yaitu 3,273 dan 0,306. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### 4.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,931, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 59 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai DW 1,931 lebih besar dari batas atas (dU) 1,61 dan kurang dari 2,069 (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

### 4.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik *Scateer plot* dari penelitian ini terlihat pada Gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 : *Scatterplot*

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda untuk memprediksi besarnya variabel terikat terhadap variabel bebas, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 55.291,826 + 16,527 X1 + 5,603 X2$$

Dari persamaan regresi linier berganda, maka dapat diartikan bahwa:  $\alpha = 55.291,826$  merupakan nilai konstanta. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen (pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata) dianggap konstan maka Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau

akan meningkat sebesar Rp 55.291.826.000,00.

$B1 = 16,527$  merupakan slope atau koefisien arah variabel pajak industri pariwisata ( $X1$ ) yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau ( $Y$ ), artinya setiap kenaikan 1 juta variabel pajak industri pariwisata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau sebesar Rp 16.527.000, jika variabel lainnya dianggap konstan.

$B2 = 5,603$  merupakan slope atau koefisien arah variabel retribusi obyek wisata ( $X2$ ) yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau ( $Y$ ), artinya setiap kenaikan 1 juta variabel retribusi obyek wisata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau sebesar Rp 5.603.000, jika variabel lainnya dianggap konstan.

#### 4.4 Hasil Pengujian Statistik

##### 4.4.1 Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, maka dapat diuraikan hasil analisis secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel pajak industri pariwisata ( $X1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau ( $Y$ ), dari hasil perhitungan parsial menunjukkan bahwa pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  diperoleh nilai nilai

tabel sebesar 1,673. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 1,081 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak industri pariwisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Y).

2. Pengaruh variabel retribusi obyek wisata (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Y), dari hasil perhitungan parsial menunjukkan bahwa pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  diperoleh nilai nilai tabel sebesar 1,673. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 1,707 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel retribusi obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Y).

#### **4.4.2 Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai  $F$  sebesar 11.712 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen pajak industri pariwisata (PIP) dan retribusi obyek wisata (ROW) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PIP dan ROW

secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

#### **4.4.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,247. Hal ini berarti 24,7% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu PIP dan ROW. Sedangkan sisanya ( $100\% - 24,7\% = 75,3\%$ ) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

### **4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

#### **4.5.1 Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pajak Industri Pariwisata memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pajak Industri Pariwisata sebesar 0,005 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pajak Industri pariwisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Tirtawati yang menemukan bahwa Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (Pajak Industri Pariwisata) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Saepurahman (2012) juga menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan Friedman (1978) dalam Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Seperti yang diketahui industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas negara (devisa) pada umumnya dan kas daerah (PAD) pada khususnya, untuk itu perlu adanya pengembangan industri pariwisata baik itu objek wisata atau fasilitas pendukung lainnya dengan bermuara pada peningkatan pendapatan.

#### **4.5.2 Pengaruh Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Retribusi Obyek Wisata memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pajak Industri Pariwisata sebesar 0,03 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Retribusi Obyek Wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yang berarti semakin meningkat retribusi obyek wisata semakin meningkat pula PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliafitri Dj. Gafur, S.E. Par (2008) yang meneliti Analisis Sektor Pariwisata

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Akbar (2012) juga menemukan bahwa retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Retribusi obyek wisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Dan nantinya akan memberikan sumbangan/pemasukan bagi PAD. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah berjalan melalui wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di kabupaten / kota Provinsi Riau yang secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi obyek wisata itu sendiri, sehingga nantinya akan meningkatkan PAD.

## **5 Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil output regresi dari F-statistik menyimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau diterima. Sedangkan menurut hasil output regresi dari t-statistik menyimpulkan bahwa variabel

yang paling mempengaruhi terhadap PAD adalah variabel pajak industri pariwisata dengan t hitung sebesar 1,801 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi R-Square ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0.247 yang berarti 25 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau secara bersama – sama dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata.

## 5.2 Saran

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau disarankan untuk meningkatkan program-program yang berkaitan dengan promosi pariwisata, memperbaharui mekanisme pemungutan pajak, pendataan ulang jumlah hotel dan restoran agar tidak terjadi kebocoran pajak serta meningkatkan jumlah obyek pajak agar lebih meningkatkan retribusi obyek wisata. Selain itu diharapkan pemerintah membuat beberapa fasilitas-fasilitas baru yang dapat dinikmati oleh para wisatawan di daerah tujuan wisata agar para wisatawan menjadi lebih tertarik untuk berkunjung ke daerah tersebut sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M Ilham. 2011. *Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan*

*kabupaten Gianyar tahun 1991–2010*. Universitas Ganesha, Bali.

Astuti, Ni Ketut Rendi & Ni Made Gunastri. 2013. *Pengaruh kunjungan wisatawan dan penerimaan sector pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung*. Dosen STIA dan STIMI Handayani Denpasar, Bali.

Brahmantio. 2008. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip

Gujarati, Damodar. 2009. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill, New York.

Gunastri. 2013. *Pengaruh Kunjungan Wisatawan dan Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*. STIA Denpasar, Bali.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta

Nasrul, Qadarrochman. 2010. *Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Skripsi S1 Jurusan IESP Universitas Diponegoro, Semarang.

- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pleanggra, Ferry. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Wisata 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pratiwi, Maulida Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Tesis S2 UII, Yogyakarta.
- Rahayu, Fitri. 2006. *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Bogor*. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Rahma, Femi Nadya & Herniwati Retno Handayani. 2013. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus*. Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia. *Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Riduwan. 2012. *Pengantar Statistika Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Saepurahman, Acep Sani. “*Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya*” : *Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*. Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Bandung.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Oloan. 2008. *Hukum Pajak*. Nomensen Press, Medan.
- Suwantoro. 2007. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Wahab, Salah. 2006. *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia.